

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Identifikasi Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Objek

Wisata Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan

1. *Stakeholders* mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan objek wisata Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan. Pemerintah membutuhkan bantuan dan dukungan dari aktor lainnya baik dari segi finansial maupun tenaga. Agar kemitraan dapat berjalan dengan lancar, maka masing-masing *stakeholders* memiliki peranan tersendiri sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Peran dari masing-masing *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan objek wisata Telaga Sarangan Kabupaten Magetan:

Berikut peran dari masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan objek wisata Telaga Sarangan Kabupaten Magetan:

- 1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berperan dalam pendampingan langsung pengembangan objek wisata Telaga Sarangan.
- 2) Dinas Perhubungan berperan dalam penyediaan sarana prasarana dalam bidang perhubungan, contohnya: lahan parkir.

- 3) Bappeda berperan dalam kajian dan perencanaan pengembangan objek wisata Telaga Sarangan termasuk salah satunya adalah lahan parkir di objek wisata Telaga Sarangan, bekerjasama dengan Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan. Peran Bappeda lainnya adalah pemverifikasian program dan anggaran dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan.
- 4) Dinas PUPR berperan dalam tata ruang bangunan di sekitar objek wisata Telaga Sarangan termasuk pencarian lokasi yang tepat untuk lahan parkir di objek wisata Telaga Sarangan.
- 5) Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam Pengelolaan Sampah termasuk diantaranya penyediaan TPS di objek wisata Telaga Sarangan.
- 6) BPPKAD berperan dalam monitoring retribusi dan pajak, sesuai dengan laporan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan.
- 7) BBWSBS berperan untuk menjamin bahwa pengembangan objek wisata Telaga Sarangan tidak merusak lingkungan.
- 8) Perum Perhutani berperan dalam pemberian ijin dan monitoring pengembangan objek wisata Telaga Sarangan mengingat lahan di sekitar objek wisata Telaga Sarangan adalah milik Perhutani.
- 9) Pihak pengusaha pariwisata berperan dalam penyediaan sarana prasarana pariwisata dalam bentuk usaha pariwisata, contohnya: hotel dan restoran.
- 10) Masyarakat berperan untuk memberikan ide dan saran kepada pemerintah tentang pengembangan objek wisata Telaga Sarangan, merawat

keindahan objek wisata Telaga Sarangan, serta memanfaatkan fasilitas yang ada di objek wisata Telaga Sarangan.

3. Kemitraan akan berjalan lancar apabila seluruh *stakeholders* yang terlibat mampu berkoordinasi dengan baik. Koordinasi dilakukan dengan cara mengadakan rapat rutin setiap bulan, rapat dinas setiap 3 bulan sekali serta rapat koordinasi Tim Pengembang Kepariwisataaan sekitar 1-2 kali dalam setahun.
4. Pemerintah, pengusaha pariwisata dan masyarakat diketahui adanya persaingan atau kompetisi yang kuat. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR tentunya berusaha untuk dapat menyediakan berbagai fasilitas yang dapat menunjang pengembangan objek wisata Telaga Sarangan. Tidak berbeda dengan pengusaha pariwisata yang juga berlomba-lomba untuk mencari peluang dalam melakukan usaha pariwisata.
5. Setiap aktor harus bekerjasama untuk dapat menyukseskan pengembangan objek wisata Telaga Sarangan. Kooperasi yang dilakukan dalam pengembangan objek wisata Telaga Sarangan dapat berupa kerjasama dalam aspek objek wisata, kerjasama dalam aspek sarana prasara kepariwisataan atau dalam aspek informasi dan promosi pariwisata.
6. Kolaborasi tidak hanya tentang hasil tetapi juga tentang proses kerjasama. Seperti halnya dalam pengembangan objek wisata telaga tak bisa terlepas

dari proses dalam bekerjasama tersebut. Proses dalam kolaborasi terkait dengan bagaimana upaya pemerintah untuk dapat mendengar kebutuhan masyarakat. Proses dalam kolaborasi dapat dilihat salah satunya melalui forum terkait dengan kemitraan dalam pengembangan objek wisata Telaga Sarangan.

7. Hambatan yang biasa dihadapi dalam pengembangan objek wisata Telaga Sarangan yaitu keterbatasan anggaran, bencana alam (tanah longsor) dan sinkronisasi program.

5.1.2 Identifikasi Kemitraan dalam Pengembangan Objek Wisata Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan

1. Pemerintah mengadakan berbagai kegiatan dalam menjalin kemitraan pengembangan objek wisata Telaga Sarangan. Instansi-instansi pemerintah secara rutin melakukan rapat koordinasi untuk membahas pengembangan objek wisata Telaga Sarangan. Saat sekarang kemitraan dengan swasta terutama dalam aspek sarana prasarana kepariwisataan masih sangat kurang.
2. Kemitraan antara sesama instansi pemerintah sudah sampai pada derajat *action networks* atau pelaksanaan. Instansi-instansi pemerintah sudah menjalin kemitraan dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan dengan membentuk Tim Pengembang Kepariwisata. Selain itu, ada kerjasama dengan Karisma Pawirogo yang tujuannya juga untuk mengembangkan objek wisata Telaga Sarangan.

3. Dalam derajat kemitraan *information networks* dilihat dari adanya sarana bertukar informasi, teknologi maupun adanya sarana bertukar informasi semuanya dalam kategori kuat.
4. Dalam derajat kemitraan *developments networks* dilihat dari adanya pendidikan langsung dan pelayanan langsung semuanya dalam kategori kuat kecuali kemitraan antara pemerintah dengan pengusaha pariwisata karena belum adanya pelayanan langsung.
5. Dalam derajat kemitraan *outreach networks* dilihat dari penyusunan program kemitraan antara pemerintah dengan pemerintah serta pemerintah dengan masyarakat berjalan kuat, namun pengusaha pariwisata kurang dilibatkan sehingga kemitraan antara pemerintah dan swasta masih lemah. Apabila dilihat dari strategi untuk dilaksanakan bersama antara pemerintah kemitraan antara pemerintah dengan pemerintah kuat namun kemitraan antara pemerintah dengan pengusaha pariwisata dan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat masih lemah.
6. Dalam derajat *action networks* dilihat dari pelaksanaan kemitraan antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan pengusaha pariwisata serta pemerintah dengan masyarakat semuanya masih dalam kategori lemah.
7. Bentuk kerjasama dengan masyarakat adalah dengan Pemilihan duta wisata yang selanjutnya disebut Ibadi (Ikatan Bagus Dyah) dan juga berbagai pelatihan dan pembinaan untuk pengelola Objek Daya Tarik Wisata (ODTW). Contoh

pembinaan untuk pengelola Objek Daya Tarik Wisata adalah Sertifikasi *front office* dan sertifikasi bagi paguyuban perahu.

8. Kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta dalam pengembangan belum berjalan optimal, namun salah satu bentuk kemitraan yang sudah dijalin adalah dengan Telkomsel. Pihak Telkomsel memberikan fasilitas layanan *wifi* di sekitar objek wisata Telaga Sarangan. Bentuk kemitraan yang dilakukan berbentuk BOT (*Build, Operate, Transfer*). Artinya, pengusaha pariwisata yang membangun, kemudian menyerahkan asetnya dan dikelolakembali oleh pemerintah. Selain itu adalah kerjasama dengan pemilik restoran dan hotel yang tergabung dalam PHRI dalam bentuk BOO (*Build, Own, Operate*).

5.2 Saran

Kemitraan dalam pengembangan objek wisata Telaga Sarangan di Kabupaten Magetan belum berjalan secara optimal. Kemitraan masih berjalan antara pemerintah dengan pemerintah serta pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan kemitraan dengan pihak swasta belum terjalin dengan baik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang telah dibuat, berikut saran yang dapat diberikan guna meningkatkan kemitraan dalam pengembangan objek wisata Telaga Sarangan:

- 1) Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada para pengusaha agar turut serta dalam pengembangan objek wisata Telaga Sarangan.

- 2) Membuat peraturan daerah terkait kemitraan dalam pengembangan objek wisata Telaga Sarangan.
- 3) Meningkatkan pelayanan langsung untuk pengusaha pariwisata misalnya dibuat pos-pos pengaduan atau konsultasi usaha.
- 4) Meningkatkan kerjasama antara pemerintah